

# JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PELAKSANAAN  
OTONOMI DAN KEMANDIRIAN DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
Parulian Simanjuntak  
Jusmer Sihotang

PENGARUH STRATEGI PERLUASAN MEREK ATAS CITRA MEREK  
(STUDI PADA HARIAN KOMPAS DAN KOMPAS TV)  
Romindo Megawati Pasaribu

INDEKS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN DAN  
ANTAR KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA  
Elvis F. Purba

PENGARUH TOTAL KUALITAS AKRUAL TERHADAP KONTRAK KOMPENSASI  
MANAJEMEN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)  
Herti Diana Hutapea  
Jadongan Sijabat

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
SEBAGAI KEUNGGULAN KOMPETITIF PERUSAHAAN  
Magdalena Siringoringo  
Oloan Simanjuntak

ANALISIS PENGARUH *WORK LIFE BALANCE* DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP  
*TURNOVER INTENTION* KARYAWAN  
(STUDI KASUS PADA PT CATUR KARYA SENTOSA MEDAN)  
Juara Simanjuntak



F E U H N

Volume IV, No 1, Januari 2013

ISSN 2086-6879

---

# JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

---

Volume IV, No. 1  
Januari 2013

- ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAN KEMANDIRIAN DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
Parulian Simanjuntak  
Jusmer Sihotang 154-172
- PENGARUH STRATEGI PERLUASAN MEREK ATAS CITRA MEREK (STUDI PADA HARIAN KOMPAS DAN KOMPAS TV)  
Romindo Megawati Pasaribu 173-188
- INDEKS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN DAN ANTAR KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA  
Elvis F. Purba 189-195
- PENGARUH TOTAL KUALITAS AKRUAL TERHADAP KONTRAK KOMPENSASI MANAJEMEN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)  
Herti Diana Hutapea  
Jadongan Sijabat 196-213
- IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI KEUNGGULAN KOMPETITIF PERUSAHAAN  
Magdalena Siringoringo  
Oloan Simanjuntak 214-223
- ANALISIS PENGARUH *WORK LIFE BALANCE* DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP *TURNOVER INTENTION* KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT CATUR KARYA SENTOSA MEDAN)  
Juara Simanjuntak 224-238



## INDEKS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN DAN ANTAR KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA

Elvis F. Purba<sup>1</sup>

### Abstract

*This paper is shown the interregional development inequality in regencies and cities of North Sumatera. According to the statistical data and by using the regional disparity index which formulated by Jeffry Williamson, are known the development inequality for regency and city in 2001-2010. Degree of development inequality towards increasing. Development inequality is worst in North Sumatra Province compare to regency and city regions. Thus, disparity of income distribution in regencies is lower than cities or North Sumatra.*

*Keywords: inequality, income distribution, interregional development*

### 1. PENDAHULUAN

Masalah ketimpangan pembangunan antarwilayah telah banyak dibahas para ahli, baik secara teoritis maupun empiris. Penelitian terdahulu yang mengupas masalah ketimpangan ekonomi regional di Indonesia, diantaranya oleh J.S Uppal dan Budiono Sri Handoko (1986) serta Adler Haymans Manurung (1991). Khusus untuk daerah Sumatera Utara dapat disebutkan beberapa penelitian tentang ketimpangan pembangunan, antara lain Sianturi (2005), Sihotang (2008), Purba (2012a), dan Simanjuntak (2012). Tulisan dan penelitian tersebut menggunakan formula tertentu untuk menghitung indeks ketimpangan antardaerah dan menafsirkannya.

Salah satu data yang selalu dipublikasi BPS adalah data produk domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Data pendapatan per kapita memang memiliki beberapa kelemahan metodologi sebagai indeks kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2007; Purba, 2011) akan tetapi sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dan bahkan membandingkan keberhasilan pembangunan antarwilayah. Berdasarkan data PDRB per kapita akan dianalisis apakah indeks ketimpangan pembangunan antarkabupaten atau antarkota di Provinsi Sumatera Utara semakin besar atau semakin kecil seiring dengan berlalunya waktu.

Salah satu formula sederhana untuk menghitung indeks ketimpangan pembangunan adalah yang dikemukakan Jeffry Williamson yang dikenal dengan koefisien disparitas regional atau Indeks Williamson (Purba, 2012a; Sjafrizal, 2008; Kuncoro, 2004). Indeks ketimpangan tersebut mempunyai nilai antara nol dan satu dalam arti indeks yang semakin besar berarti derajat ketimpangannya semakin memburuk, yang bermakna bahwa ketimpangan pembangunan

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan

semakin meningkat. Sebaliknya, bila indeks tersebut semakin kecil berarti derajat ketimpangan pembangunan semakin baik dalam arti ketimpangan pembangunan semakin menurun.

## 2. METODE PENELITIAN

Tulisan membahas ketimpangan pembangunan, antar daerah wilayah Pantai Timur, Pantai Barat, dan Dataran Tinggi Provinsi Sumatera Utara (Purba, 2012b). Tulisan ini juga memberi deskripsi tentang bagaimana derajat ketimpangan pembangunan antar kota dan kabupaten di provinsi yang sama selama periode 2001-2010.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan formula Williamson, untuk menghitung indeks ketimpangan ini digunakan data PDRB per kapita (sebagai proksi pendapatan per kapita) dan jumlah penduduk. Formulasnya adalah:

$$V_w = 1/Y \sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 n/N}$$

dimana  $Y_i$  adalah PDRB per kapita kabupaten atau kota yang dikaji,  $Y$  adalah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara,  $n$  menyatakan jumlah penduduk kabupaten atau kota yang dikaji, dan  $N$  adalah jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena indeks ketimpangan tersebut mempunyai nilai antara nol hingga satu sehingga dapat diinterpretasi secara kualitatif sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Interpretasi Indeks Williamson

No.	Indeks Williamson	Derajat Ketimpangan
1.	$0,00 \leq V_w \leq 0,20$	sangat rendah
2.	$0,21 \leq V_w \leq 0,40$	rendah
3.	$0,41 \leq V_w \leq 0,61$	sedang
4.	$0,61 \leq V_w \leq 0,80$	tinggi
5.	$0,81 \leq V_w \leq 1,00$	sangat tinggi

Sumber: Purba, 2012b.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Jumlah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara

Jumlah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara bertambah banyak, terutama sejak pemberlakuan otonomi daerah. Sebagai contoh, pulau Nias yang sebelumnya hanya 1 kabupaten telah mengalami pemekaran dan kini menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. Selain itu kabupaten yang mengalami pemekaran dalam 10 tahun terakhir adalah Kabupaten Tapanuli



Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu sehingga jumlahnya saat ini sebanyak 33 yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota
2001	15	6
2002	15	7
2003	15	7
2004	18	7
2005	18	7
2006	18	7
2007	19	7
2008	21	7
2009	23	7
2010	25	8

Sumber: Dihitung dari data BPS Provinsi Sumatera Utara

### 3.2. Gambaran Umum PDRB Per Kapita

Berdasarkan data sekunder yang diterbitkan BPS Provinsi Sumatera Utara, ternyata ada 7 kabupaten yang mempunyai PDRB per kapita di atas PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara, yaitu Tanah Karo (tahun 2001-2010), Labuhan Batu (tahun 2001-2007), Asahan (tahun 2001-2006), Toba Samosir (2003-2010), Batubara (tahun 2007-2010), Labuhan Batu Selatan (tahun 2009-2010), serta Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan, masing-masing untuk tahun 2009-2010. Kecuali Tanah Karo dan Toba Samosir, maka 5 kabupaten lainnya merupakan daerah perkebunan yang relatif maju. Sementara itu, kota Medan dan Tanjung Balai merupakan dua kota yang PDRB per kapitanya di atas PDRB per kapita provinsi, masing-masing tahun 2001 hingga 2010. Data ini menunjukkan bahwa tujuh kabupaten dan dua kota tersebut yang tergolong daerah makmur dalam konteks Provinsi Sumatera Utara untuk periode tersebut.

Apabila PDRB per kapita dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi berarti pembangunan yang terjadi di 7 kabupaten dan 2 kota tersebut lebih berhasil meningkatkan pendapatan per kapita dibandingkan dengan pembangunan yang dialami Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan.

### 3.3. Gambaran Ketimpangan Pembangunan

#### *Ketimpangan Antar Kabupaten*

Indeks ketimpangan pembangunan antar kabupaten tahun 2001 hingga 2010 berada antara 0,203 hingga 0,317 (Tabel 3). Indeks tertinggi terjadi tahun 2007 dan terendah adalah tahun 2005. Walaupun rentangnya setiap tahun relatif kecil, namun data ini menunjukkan bahwa derajat

ketimpangan pembangunan antar kabupaten mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menaik. Dan mengikuti Tabel 1, indeks tersebut berada dalam derajat ketimpangan yang "rendah".

Tabel 3. Indeks dan Derajat Ketimpangan Antar Kabupaten

Tahun	Vw	Derajat Ketimpangan
2001	0,249	Rendah
2002	0,244	Rendah
2003	0,248	Rendah
2004	0,242	Rendah
2005	0,204	Rendah
2006	0,235	Rendah
2007	0,317	Rendah
2008	0,315	Rendah
2009	0,309	Rendah
2010	0,317	Rendah

Sumber: Purba, 2012a dan Simanjuntak, 2012.

Mengapa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun? Berdasarkan variabel untuk menghitung indeks ketimpangan, maka ada 3 kemungkinan yang menyebabkannya, yaitu: (1) selisih PDRB per kapita masing-masing kabupaten dengan provinsi, (2) proporsi penduduk masing-masing kabupaten, dan (3), pertambahan kabupaten akibat pemekaran. Selisih PDRB per kapita masing-masing kabupaten dengan provinsi sangat bervariasi dari tahun ke tahun sedangkan variasi proporsi penduduk setiap tahun relatif kecil. Kemudian jumlah kabupaten pun terus bertambah, terutama 5 tahun terakhir sehingga dapat berpengaruh terhadap keakuratan data.

#### **Ketimpangan Antar Kota**

Indeks ketimpangan pembangunan antar kota tahun 2001 hingga 2010 berada antara 0,263 hingga 0,355. Indeks tertinggi terjadi tahun 2010 dan terendah tahun 2001 (Tabel 4). Data tersebut menunjukkan bahwa derajat ketimpangan pembangunan antarkota tergolong "rendah" namun dilihat dari nilai nominalnya, indeks ketimpangan pembangunan antar kota selalu lebih tinggi dibandingkan dengan indeks ketimpangan pembangunan antar kabupaten setiap tahunnya. Walaupun sama-sama tergolong "rendah", akan tetapi berbeda dengan apa yang terjadi antarkabupaten yang menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat. Sementara itu indeks ketimpangan antar kota menunjukkan kenaikan tahun demi tahun kecuali tahun 2002 (Tabel 4).



Tabel 4. Indeks dan Derajat Ketimpangan Antar Kota

Tahun	Vw	Derajat Ketimpangan
2001	0,263	Rendah
2002	0,291	Rendah
2003	0,282	Rendah
2004	0,294	Rendah
2005	0,307	Rendah
2006	0,323	Rendah
2007	0,332	Rendah
2008	0,339	Rendah
2009	0,354	Rendah
2010	0,355	Rendah

Sumber: Purba, 2012a dan Simanjuntak, 2012.

#### *Indeks Ketimpangan Sumatera Utara*

Indeks ketimpangan pembangunan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan sedikit fluktuasi dan dengan indeks yang semakin besar. Indeks terendah terjadi tahun 2002 dan tertinggi tahun 2010 yang disajikan dalam Tabel 5. Jika dibandingkan dengan indeks ketimpangan pembangunan antar kabupaten dan antar kota yang berada dalam kelompok "rendah", ketimpangan dalam skala makro (Provinsi Sumatera Utara) menjadi lebih buruk. Angka-angka tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan semakin memburuk, yakni dari ketimpangan "rendah" (tahun 2000-2006) menjadi ketimpangan "sedang" (tahun 2007-2010). Atau dengan kata-kata lain, dalam skala provinsi, ketimpangan pembangunan antar daerah ternyata tidak lebih baik dibandingkan dengan skala kabupaten dan kota. Demikian juga bila dibandingkan dengan antar wilayah Dataran Tinggi, Pantai Barat, dan Pantai Timur (Purba, 2012b).

Tabel 5. Derajat Ketimpangan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Vw	Derajat Ketimpangan
2001	0,367	Rendah
2002	0,365	Rendah
2003	0,376	Rendah
2004	0,381	Rendah
2005	0,369	Rendah
2006	0,399	Rendah
2007	0,460	Sedang
2008	0,464	Sedang
2009	0,470	Sedang
2010	0,476	Sedang

Sumber: Purba, 2012a dan Simanjuntak, 2012.

Perbandingan indeks ketimpangan pembangunan antar kabupaten, antar kota, dan provinsi (Tabel 6) menggambarkan bahwa distribusi pendapatan, baik antar kabupaten, antar kota maupun dalam konteks provinsi cenderung semakin memburuk. Distribusi pendapatan antar

kabupaten lebih baik dibandingkan dengan distribusi pendapatan antarkota serta distribusi pendapatan antar kota masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan.

Tabel 6. Perbandingan Indeks Ketimpangan Antar Kabupaten dan Antar Kota Provinsi Sumatera Utara.

Tahun	Antar kabupaten	Antar kota	Sumatera Utara
2001	0,249	0,263	0,367
2002	0,244	0,291	0,365
2003	0,248	0,282	0,376
2004	0,242	0,294	0,381
2005	0,204	0,307	0,369
2006	0,235	0,323	0,399
2007	0,317	0,332	0,460
2008	0,315	0,339	0,464
2009	0,309	0,354	0,470
2010	0,317	0,355	0,476

Sumber: Tabel 3,4, dan 5.

#### 4. PENUTUP

Untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah atau antar wilayah tidak terbatas pada indeks ketimpangan yang dikemukakan Williamson. Masih terdapat formula lain yang didasarkan atas pemikiran tertentu, misalnya adalah indeks Theil dan lain-lain. Untuk mengetahui dengan pasti bagaimana gambaran ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara dapat membandingkannya dengan hasil penelitian yang ada dalam tulisan ini. Selain itu mengapa indeks ketimpangan antar kota lebih besar dari indeks ketimpangan antar kabupaten perlu mempertimbangkan banyak variabel yang belum dibahas dalam tulisan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudrajad, (2004), *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, .....*, .....  
*Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Manurung, Adler Haymans, (1991), "Ketimpangan Spasial dan Kemiskinan di Indonesia" dalam  
*Buletin Ilmiah Tarumanegara*, Th. 6 No. 21, hal. 89-103.
- Purba, Elvis F., *Ekonomi Regional*. (2011), Modul. Medan: Fakultas Ekonomi UHN, 2011.
- Purba, Elvis F., (2012a), *Ketimpangan Pembangunan Antardaerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2000-2009*. Laporan Hasil Penelitian, Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP  
Nommensen.
- Purba, Elvis F., (2012b), "Ketimpangan Pembangunan Antardaerah Wilayah Pantai Timur, Pantai  
Barat, dan Dataran Tinggi Provinsi Sumatera Utara" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*  
Volume III, No. 2, Juli, hal. 133-142.
- Sianturi, Sopar, (2005), *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kota di Provinsi Sumatera Utara*.  
Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, (Skripsi tidak diterbitkan).
- Sjafrizal, (2008), *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Padang: Baduose Media.
- Sihotang, Parlin L., (2008), *Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Pantai Barat  
Sumatera Utara (Suatu Analisis Dengan Pendekatan Indeks Williamson dan Indeks Pembangunan  
Manusia)*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, (Skripsi tidak  
diterbitkan).
- Simanjuntak, Dedy Afrianto, (2012), *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antardaerah di  
Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, (Skripsi  
tidak diterbitkan).
- Sukirno, Sadono, (2007), *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Uppal, J.S. and Handoko, Budiono Sri, (1986), "Regional Income Disparities in Indonesia" dalam  
*Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI)*, Vol. XXXIV, No. 3, hal. 287-304.